

2024



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DIY

Jalan Kenari No. 14 A, Yogyakarta, Kode Pos – 55166

Telp. : (0274) 555836; Fax : (0274) 554206

Surel : bpbd@jogjaprovo.go.id

Laman : bpbd.jogjaprovo.go.id

Kata Pengantar

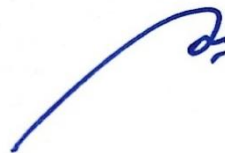
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2024 diwarnai dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi. Namun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2022 – 2027. Proses penyusunan laporan ini membutuhkan kesiapan dan kerja keras dari seluruh jajaran instansi pemerintah terkait, agar dapat menghasilkan sebuah laporan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal 13 Februari 2025

Kepala Pelaksana BPBD



Drs. Noviar Rahmad, M.Si.

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY Tahun 2024 dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

Capaian tujuan “Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana” :

- Diukur dengan indikator Kontribusi capaian 5 prioritas dalam IKD terhadap Ketahanan Daerah DIY.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) Sasaran Strategis, yakni Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana dan Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di BPBD DIY;
 - Target capaian indikator tujuan tahun 2024 sebesar 101,4%; sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 101,4%. Dengan demikian capaian ini telah sesuai dengan target. Prosentase realisasi terhadap target (Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY dibagi angka Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY dikali 100%).
1. Capaian sasaran strategis 1 “Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana”:
- Diukur dengan indikator Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY (Skor Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik + Skor Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana + Skor Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana + Skor Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana + Skor Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana) dibagi 5.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) Program, yakni Program Penanggulangan Bencana, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 0,71 (angka); sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 0,71 (angka). Dengan demikian capaian ini telah mencapai target. Prosentase realisasi terhadap target

(Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%.

2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah”:
 - Diukur dengan indikator Kategori RB Perangkat Daerah (meta indikator nilai A)
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 87,16 (indeks); sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 87,16 (indeks). Dengan demikian capaian ini telah mencapai target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY ke depan, sebagai berikut:

1. Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan, Renstra BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 selain berpedoman pada RPD DIY, juga mempedomani dokumen RTRW DIY dan mengarah pada terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemanfaatan ruang, baik kebijakan struktur tata ruang maupun kebijakan pola tataruang. Selain itu, dokumen Renstra BPBD DIY 2022-2027 didasari pada KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) DIY untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan terkait dengan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kejadian bencana alam di Indonesia yang terulang baik jenis yang sama maupun berbeda mendorong semakin pentingnya peran pengurangan resiko bencana. SFDRR (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction) 2015-2030, yang disepakati dalam Konferensi Pengurangan Resiko Bencana Dunia di Kobe pada tahun 2005, mengamanatkan perencanaan tata ruang sebagai salah satu alat untuk pengurangan resiko bencana. Peran perencanaan tata ruang dalam pengurangan risiko bencana telah banyak diusulkan dalam praktik perencanaan baik di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang. Pengurangan

risiko bencana umumnya dilakukan secara struktural yaitu membangun fisik misalnya tanggul sungai, namun dapat juga dilakukan dengan cara lain, salah satunya dengan peningkatan ketahanan komunitas (community resilience) masyarakat yang dapat dilakukan dengan mengadopsi perencanaan tata ruang khususnya isi pola ruang;

3. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dokumen RTRW diharapkan menjadi dasar dalam pengaturan, pengendalian dan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten/Kota sehingga pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan terhindar dari bencana, mengingat di setiap wilayah administrasi Kabupaten di Indonesia selalu dijumpai bagian yang rawan bencana. Kondisi eksisting penggunaan lahan saat ini banyak bertampalan dengan wilayah rawan bencana. Oleh karena itu perlu suatu kegiatan untuk mengintegrasikan antara RTRW dengan kondisi bencana di Indonesia. Struktur ruang khususnya jaringan jalan dapat memberikan akses ke wilayah terdampak longsor maupun banjir dengan baik sehingga evakuasi mudah dilaksanakan. Integrasi diperlukan untuk mengimplementasikan pola ruang maupun struktur ruang selanjutnya yang diperlukan untuk kajian rekayasa penanggulangan wilayah rawan bencana dengan cara struktural berupa bangunan fisik, maupun peningkatan kapasitas masyarakat dan pemasangan instrumen peringatan dini yang akan dipasang pada wilayah rawan bencana. Alokasi pola ruang khususnya pada penggunaan lahan yang rawan terdampak bencana perlu ditinjau kembali atau dibuat infrastruktur untuk mengurangi dampak;
4. pemulihan pasca bencana pandemi dan wabah penyakit Covid-19 yang menuntut sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, antisipasi eskalasi penyebaran dan meningkatkan kesiapsiagaan, kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan menangkal COVID-19.

Daftar Isi

Kata Pengantar	2
Ikhtisar Eksekutif	3
Daftar Isi	5
BAB I Pendahuluan	8
1.1. <i>Cascading Kinerja</i> dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah	8
1.2. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan	10
1.3. Isu-Isu Strategis	11
1.4. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	13
1.5. Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2023	17
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	18
2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	18
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan	18
2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024	19
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	22
2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	24
BAB III Akuntabilitas Kinerja	26
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024	26
3.2. Capaian Kinerja Lainnya	46
3.3. Efisiensi Anggaran	49
3.4. Inovasi	50
3.5. Lintas Sektor	53
BAB IV Penutup	53
4.1. Kesimpulan	53
4.2. Langkah Perbaikan Kinerja	53
LAMPIRAN	54

Daftar Tabel

Tabel I. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	14
Tabel I. 2 Sarana-Prasarana	15
Tabel I. 3 Anggaran Tahun 2024	16
Tabel I. 4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	17
Tabel II. 1 Tujuan dan Sasaran Strategis Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY, 2022-2027	19
Tabel II. 2 Strategi dan Arah Kebijakan	20
Tabel II. 3 Tabel Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang berkontribusi terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2024	23
Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja Sasaran Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY Tahun 2024	28
Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja Perubahan Tujuan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY Tahun 2024	29
Tabel II. 5 Perjanjian Kinerja Perubahan Sasaran Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY Tahun 2024	29
Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	31
Tabel III. 2 Capaian Kinerja Tahun 2024	31
Tabel III. 3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	34
Tabel III. 4 Skema dan bobot nilai Evaluasi Reformasi Perangkat Daerah	35
Tabel III. 5 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah tahun 2024	36
Tabel III. 6 Kategori Hasil Evaluasi RB Tahun 2024 berdasar PERMENPAN RB Nomor 9 Tahun 2024 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi	38
Tabel III. 7 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	39
Tabel III. 8 Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan SubKegiatan terhadap Sasaran 1	41
Tabel III. 9 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	50
Tabel III. 10 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	54
Tabel III. 11 Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 2	56
Tabel III. 12 Kontribusi Tujuan dan Sasaran BPBD DIY terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Daerah	61
Tabel III. 13 Kontribusi Program BPBD DIY Setda DIY terhadap Capaian Program Pemerintah Daerah	63
Tabel III. 14 Capaian Kinerja, Realisasi Anggaran Belanja dan Efisiensi Anggaran Tahun 2024	66
Tabel III. 15 Inventarisasi Lintas Sektor BPBD DIY	69

Daftar Gambar

Gambar I.1	Cascading Kinerja	10
Gambar I.2	Struktur Organisasi	11
Gambar II.1.	Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP	30
Gambar III.1	Laporan kaji cepat bencana	47
Gambar III.2	Petugas Olah Data	48
Gambar III.3	Rapat Evaluasi kejadian kebakaran dan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan	48
Gambar III.4	SK Tim Swakelola Sub Kegiatan Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia TA 2024	49
Gambar III.5	Penyusunan Perjanjian Kinerja	59
Gambar III.6	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	59

BAB I Pendahuluan

Bab I berisi:

1. *Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi*
2. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
3. *Isu-Isu Strategis*
4. *Dukungan SDM,*
5. *Sarana-Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2023*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

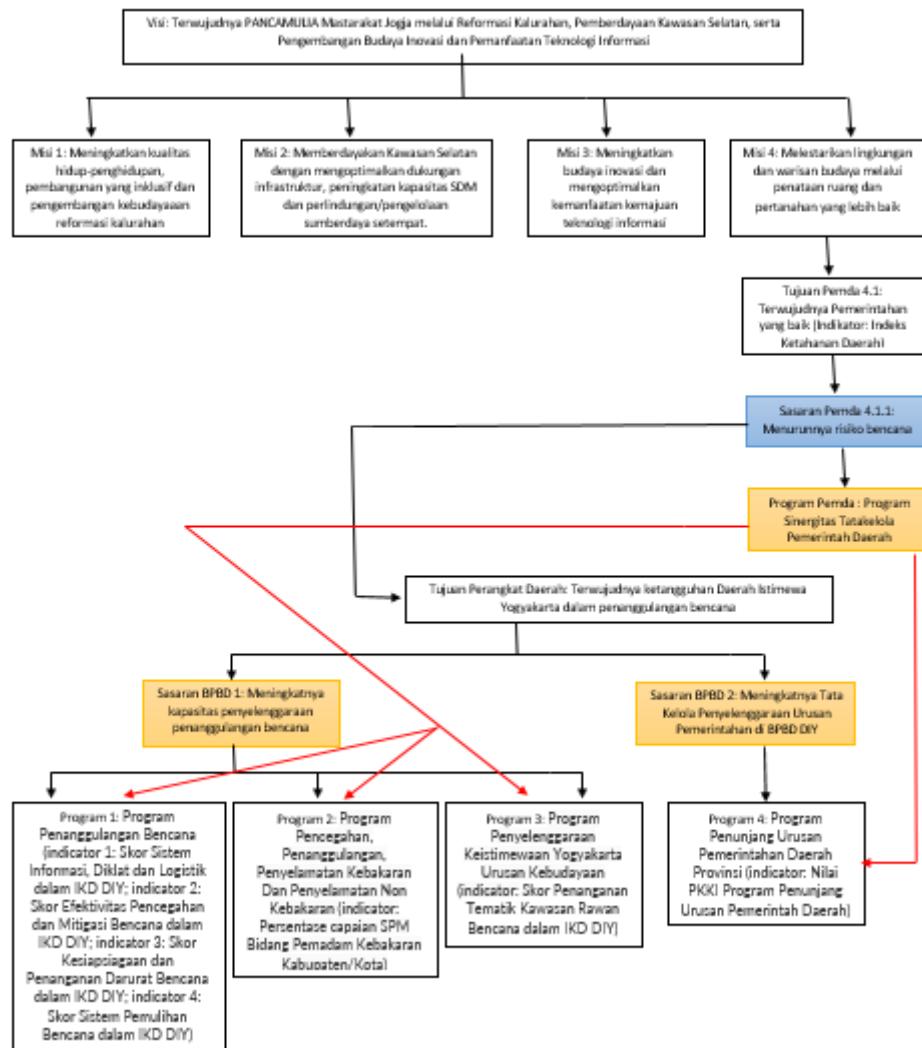
Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1. *Cascading Kinerja* dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

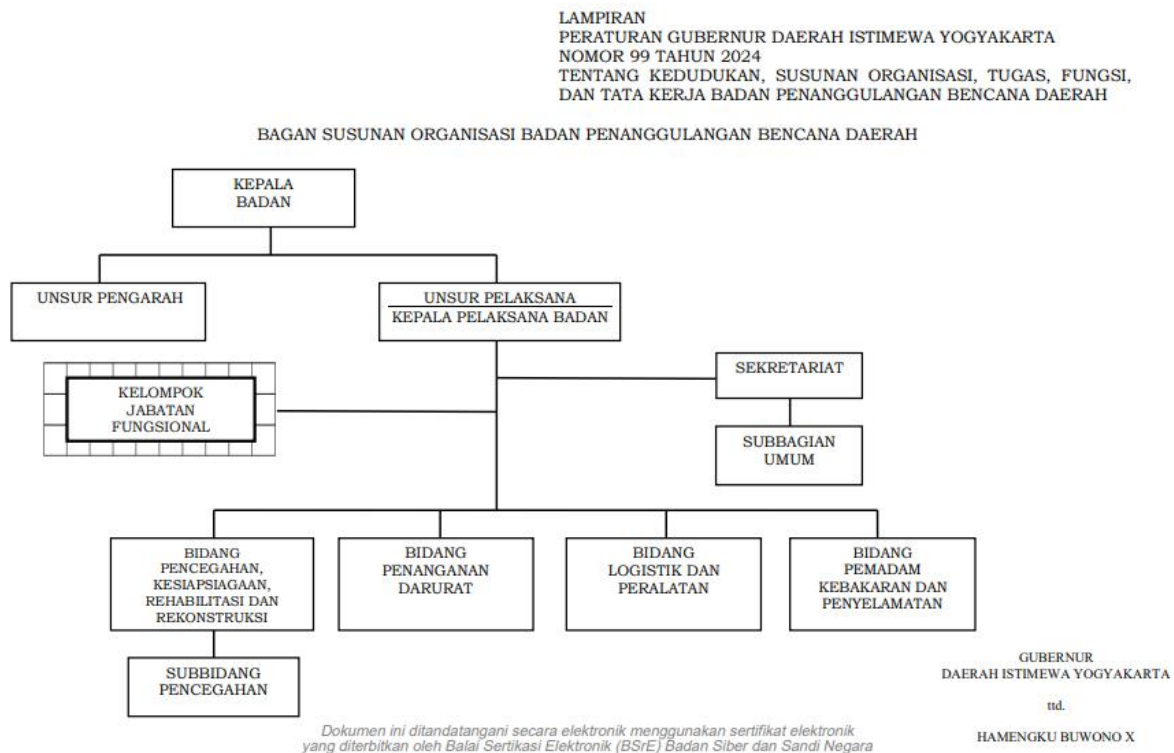
Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 – 2027. Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar I.1 Cascading Kinerja



Sumber: RPJMD 2022-2027, Renstra BPBD DIY 2022-2027

Gambar I.2 Struktur Organisasi



Sumber: Lampiran PERGUB DIY NOMOR 99 TAHUN 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY

Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD DIY 2022-2027, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2024, BPBD DIY mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang di bidang penanggulangan bencana. Adapun fungsi BPBD DIY sebagai berikut :

- Penyusunan program kerja Badan;
- Perumusan, penetapan pedoman dan pengarahannya penyelenggaraan kebijakan teknis urusan penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah;
- Penetapan standarisasi kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah;

- Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah;
- Penyusunan, penetapan dan penginformasian peta risiko bencana dan kebakaran serta prosedur tetap penanganan bencana dan kebakaran;
- Pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam pembangunan;
- Pelaksanaan komando penanganan darurat bencana;
- Pengendalian, pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana di daerah;
- Penyusunan rekomendasi tingkatan dan status bencana;
- Pengembangan kerjasama dengan multipihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran;
- Penyelenggaraan Tim Reaksi Cepat;
- Pelaksanaan Pusat Pengendalian Operasi Kebencanaan;
- Pembinaan reformasi birokrasi Badan;
- Penyusunan kebijakan proses bisnis Badan;
- Penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup Badan;
- Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang penanggulangan bencana dan kebakaran;
- Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana dan kebakaran kabupaten/kota;.
- Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Sesuai pelaksanaan tugas fungsi Organisasi dibagi habis ke dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana Peraturan Gubernur DIY Nomor 15 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pergub Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan terakhir Peraturan Gubernur DIY Nomor 99 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY.

1.2. Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung pada sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY adalah institusi sebagai penyiap bahan perumusan kebijakan dan koordinasi di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisis formasi jabatan. Isu strategis banyak

berkaitan dengan perubahan tata kelola pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, antara lain sebagai berikut:

1. Pencemaran Lingkungan dan Risiko Bencana Alam

Dinamika regulasi dan kebijakan Pemerintahan Pusat pasti berdampak pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Misalnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

2. Belum Optimalnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tingginya Alih Fungsi

3. Masih Tingginya Ketimpangan Wilayah

Ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan prima oleh tiga pilar penyelenggaraan pelayanan publik (birokrasi, dunia usaha dan masyarakat) semakin meningkat. Seiring dengan harapan tersebut, penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk selalu mengembangkan inovasi pelayanan publik antara lain melalui gerakan *One Agency One Innovation*.

4. *Penyediaan Infrastruktur Strategis di Kawasan Pesisir Selatan Belum Optimal*

Diadopsi oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai model pelayanan berbasis teknologi informasi, berdampak pada perubahan mindset dan perilaku birokrasi dari pelayanan manual kepada pelayanan digital. Proses perubahan dimaksud perlu disertai upaya inisiasi, regulasi dan asistensi penerapan tatalaksana pelayanan internal pemerintah daerah maupun pelayanan eksternal kepada masyarakat berbasis teknologi informasi.

5. Angka Kemiskinan Masih Tinggi

Salah satu tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY antara lain untuk melaksanakan fungsi penunjang di bidang Penanggulangan Bencana dan Kebakaran. Selain itu terdapat pelaksanaan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Isu akuntabilitas menekankan pentingnya membangun sistem akuntabilitas aparatur, baik menyangkut perencanaan program/kegiatan, penganggaran, penetapan kinerja, pengorganisasian, penatausahaan, monitoring, pengendalian maupun pelaporannya.

7. Percepatan Reformasi Birokrasi

Pemerintah mendorong percepatan reformasi birokrasi melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 terdapat 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi yang disasar, 5 (lima) di antaranya menjadi cakupan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY, yaitu area perubahan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah, Penataan SDM Aparatur, Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja serta Budaya dan Etika Kerja.

8. Kewenangan Keistimewaan

Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Urusan Keistimewaan yang ditetapkan dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; Kebudayaan; Pertanahan; dan Tata Ruang yang diwujudkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat sehingga diperlukan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM aparatur dalam rangka menangani urusan keistimewaan tersebut.

9. Implementasi Sistem Merit

Penerapan sistem merit dalam penerapan SDM aparatur didasarkan pada 3 (tiga) pilar, yaitu kualifikasi, kompetensi dan kinerja.

10. Pengarusutamaan gender

Penerapan pengarusutamaan gender dalam cakupan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY dan mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan. Keberpihakan kesetaraan gender pada lima sasaran *affirmative action* yakni perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok tidak mampu/miskin.

1.3. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada					Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki	Perempuan
1	2	3	4				5	6				7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	2	2				2	2				1	1
B.	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator	5					5	3	2			3	2
	2. Pengawas	2					2	2				1	1
	3. Pelaksana	16					16	4	7	2	3	7	9
C.	Jabatan Fungsional	12					12	6	6			5	7
	Jumlah	37					37	17	15	2	3	17	20

Sumber: Data Kepegawaian BPBD DIY Desember 2024

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, dengan rincian jenjang pendidikan S1 sebanyak 15 orang (40,54%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 17 orang (45,9%), D3 2 orang (5,4%), SLTA 3 orang (8,1%). Komposisi pegawai perempuan sedikit lebih banyak dibanding pegawai laki-laki; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Tabel I. 2 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
1.	ASET LANCAR		
	Kas dan Setara Kas		(17.047.525.142,00)
	Persediaan		2.178.191.335,43
	Aset Untuk Dikonsolidasikan		17.047.525.142,00
	JUMLAH ASET LANCAR		2.178.191.335,43

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
2.	ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin - Alat angkutan - Alat Kantor dan rumah tangga - Alat Studio Komunikasi dan Pengantar Gedung dan Bangunan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	 51 unit 1.155 unit 472 unit 14 unit 15 unit	 2.975.357.000,00 42.227.397.209,67 9.154.961.350,00 6.792.186.700,00
	Aset Tetap Lainnya - Buku Perpustakaan	223 buku	419.145.000,00
	Akumulasi Penyusutan		(41.829.136.010,27)
	JUMLAH ASET TETAP		19.739.911.249,40
3.	ASET LAINNYA		
	Aset Tidak Berwujud		394.500.000,00
	Aset Lain-lain		1.590.987.081,00
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(1.561.976.904,80)
	JUMLAH ASET LAINNYA		423.510.176,20
	JUMLAH ASET		22.341.612.761,03

Sumber: Data Neraca BPBD DIY 31 Desember 2024 (unaudited)

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan, 30 (tiga puluh) unit kendaraan operasional, dan 20 (dua puluh) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Tabel I. 3 Anggaran Tahun 2024

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
4			PENDAPATAN DAERAH			
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0
			Jumlah Pendapatan	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0
5			BELANJA DAERAH			
5	1		BELANJA OPERASI	Rp16.773.900.541,00	Rp17.970.441.028,00	Rp1.196.540.487,00
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp11.217.791.741,00	Rp11.395.472.278,00	Rp177.680.537,00
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp5.316.108.800,00	Rp6.316.523.750,00	Rp1.000.414.950,00
5	1	05	Belanja Hibah	Rp240.000.000,00	Rp240.000.000,00	Rp. 0
5	5	06	Belanja Bantuan Sosial	Rp. 0	Rp18.445.000,00	Rp18.445.000,00
5	2		BELANJA MODAL	Rp4.900.000,00	Rp24.700.000,00	Rp19.800.000,00
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp4.900.000,00	Rp24.700.000,00	Rp19.800.000,00
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0
			Jumlah Belanja	Rp4.900.000,00	Rp24.700.000,00	Rp19.800.000,00
			Total Surplus/(Defisit)	Rp16.778.800.541	Rp17.995.141.028	Rp1.216.340.487,00
6			PEMBIAYAAN DAERAH			
			Jumlah Penerimaan	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
	Pembiayaan			
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0
	Pembiayaan Neto	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran BPBD DIY Tahun 2024

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dana Keistimewaan. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2024 Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY semula Rp 16.778.800.541,00 dan mengalami perubahan menjadi Rp 17.995.141.028,00 atau bertambah Rp 1.216.340.487,00 Perubahan anggaran Tahun 2024 merupakan cerminan dukungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY dalam bentuk *Refocusing* dan realokasi anggaran.

1.4. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Tabel I. 4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	a) Memaksimalkan pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja agar dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan aktivitas-aktivitas yang menunjang program/kegiatan;	- Terhadap kinerja kegiatan telah menunjukan adanya perbaikan kualitas pada Log Frame, KAK, ROPK dengan keterisian 100%, lebih rinci dan terjadwal; - Catatan hasil monev terkait kinerja OPD telah di tindak lanjuti dengan kolaborasi berupa pelibatan lintas sektor dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran OPD maupun pencapaian target program; - Catatan terhadap pelaksanaan Dana Keistimewaan telah di tindak lanjuti dengan capaian fisik 100% dengan deviasi kurang 5%; - Tindak lanjut atas hasil monev PBJ berupa RUP 100 %, SPSE 100%; - Catatan hasil monev atas keterisian aplikasi Jogja Dataku sudah ditindak lanjuti dengan capaian Dataku 100%.
	b) Meningkatkan pengendalian internal khususnya dalam	- Melakukan penghematan terhadap pemakaian listrik, air dan telepon;

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
	penentuan indikator kinerja program dan rumusan indikator agar lebih menggambarkan rincian kinerja yang akan dicapai.	- Perencanaan yang dilakukan berdasarkan skala prioritas; - Mengatur kegiatan sesuai dengan angka yang telah disusun; - Perbaikan dalam pola penataan keuangan instansi.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab II berisi:

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

Tahun 2024 merupakan tahun pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027.

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2024 diwarnai agenda perubahan baik melalui mekanisme perubahan dana keistimewaan maupun perubahan APBD. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Pada dasarnya perubahan anggaran tidak mengubah target kinerja pada level tujuan Perangkat Daerah, sasaran strategis Perangkat Daerah dan program Perangkat Daerah, namun mengubah pada tataran target kinerja output dalam sub kegiatan. Perubahan anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2022-2027.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY yang merupakan penjabaran operasional RPJMD DIY Tahun 2022-2027 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu tahun 2024. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2027.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah “Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana”. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY selama lima tahun adalah:

“Terwujudnya Ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penanggulangan Bencana”

Adapun tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY dalam waktu lima tahun dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel II. 1 Tujuan dan Sasaran Strategis Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY, 2022-2027

N O.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	Kondisi Awal (Baseline 2022)	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.	Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana	Kontribusi capaian 5 prioritas dalam IKD terhadap Ketahanan Daerah DIY	Angka	93,7	100	101,4	101,3	101,2	101,2	101,2
1.	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana	Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY	Angka	0,59	0,65	0,71	0,76	0,81	0,86	0,86
2.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di BPBD DIY	Kategori RB Perangkat Daerah	Indeks	BB (> 70-80)	A (85,85)	A (87,16)	A (87,26)	A (87,36)	A (87,46)	A (87,46)

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II. 2 Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatnya Ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menghadapi bencana dan mengurangi risiko bencana di masyarakat	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	1. Memperkuat kebijakan dan kelembagaan Penanggulangan Bencana 2. Meningkatkan pengelolaan risiko dan perencanaan terpadu 3. Mengembangkan Sistem Informasi, Diklat, dan logistik 4. Menangani tematik kawasan rawan bencana 5. Meningkatkan Efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana	1. Penguatan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana 2. Forum Pengurangan Risiko Bencana 3. Penguatan Kebijakan Daerah tentang RPB 4. Penyediaan Peta Kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah 5. Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan di wilayahnya 6. Komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga- lembaga dari sektor pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
		1. Memperkuat Kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana 2. Mengembangkan Sistem Pemulihan Bencana	7. Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis 8. Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional 9. Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB 10. Penyelenggaraan Latihan (Geladi) Kesiapsiagaan 11. Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan 12. Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan 13. Penyimpanan/pegudangan Logistik PB 14. Sekolah dan Madrasah Aman Bencana 15. Rumah Sakit Aman Bencana 16. Desa Tangguh Bencana 17. Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami 18. Infrastruktur evakuasi bencana erupsi gunungapi 19. Penentuan Status Tanggap Darurat 20. Penerapan sistem komando operasi darurat 21. Pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana 22. Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
			23. Tersedianya mekanisme dan/atau rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah untuk setiap ancaman bencana yang dalam penyusunannya mempertimbangkan kebutuhan nyata dan melibatkan setiap pemangku kepentingan di daerah 24. Infrastruktur penting dapat dipulihkan dengan segera (misalnya dalam 1x24 jam) pada setiap kejadian bencana yang mempertimbangkan kebutuhan nyata dan disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah 25. Perbaikan rumah penduduk dengan lebih baik (<i>build back better</i>) dapat dijalankan secara swadaya 26. Pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana disusun bersama pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata dan risiko di masa depan.

Sumber : Dokumen Perubahan RENSTRA Tahun 2022-2027

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan dengan tercapainya tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY tahun 2024 dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel II. 3 Tabel Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang berkontribusi terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana	1. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di BPBD DIY	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp13.111.966.441,00	Rp13.266.154.928,00	Rp154.188.487,00
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp38.573.550,00	Rp10.718.550,00	(Rp27.855.000,00)
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp20.848.500,00	Rp6.943.500,00	(Rp13.905.000,00)
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp10.225.050,00	Rp1.825.050,00	(Rp8.400.000,00)
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp7.500.000,00	Rp1.950.000,00	(Rp5.550.000,00)
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp11.218.771.741,00	Rp11.412.212.278,00	Rp193.440.537,00
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp11.161.751.741,00	Rp11.346.932.278,00	Rp185.180.537,00
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp34.520.000,00	Rp34.520.000,00	Rp0,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00	Rp0,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp21.000.000,00	Rp29.260.000,00	Rp8.260.000,00
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp24.124.000,00	Rp19.781.750,00	(Rp4.342.250,00)
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp24.124.000,00	Rp19.781.750,00	(Rp4.342.250,00)

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp103.152.000,00	Rp103.152.000,00	Rp0,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp103.152.000,00	Rp103.152.000,00	Rp0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.501.375.800,00	Rp1.501.375.800,00	Rp0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp515.199.800,00	Rp515.199.800,00	Rp0,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp986.176.000,00	Rp986.176.000,00	Rp0,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp225.969.350,00	Rp218.914.550,00	(Rp7.054.800,00)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp14.000.000,00	Rp15.150.000,00	Rp1.150.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp119.242.750,00	Rp111.932.750,00	(Rp7.310.000,00)
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp77.739.600,00	Rp76.844.800,00	(Rp894.800,00)

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp14.987.000,00	Rp14.987.000,00	Rp0,00
2. Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rp2.538.199.100,00	Rp3.764.757.100,00	Rp1.226.558.000,00
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Rp829.999.550,00	Rp1.160.249.550,00	Rp330.250.000,00
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Rp659.999.550,00	Rp1.008.999.550,00	Rp349.000.000,00
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Rp170.000.000,00	Rp151.250.000,00	(Rp18.750.000,00)
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp1.057.999.850,00	Rp1.044.797.850,00	(Rp13.202.000,00)
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Rp14.999.900,00	Rp7.997.900,00	(Rp7.002.000,00)
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp368.500.000,00	Rp368.500.000,00	Rp0,00
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Rp157.999.950,00	Rp153.999.950,00	(Rp4.000.000,00)
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Rp516.500.000,00	Rp514.300.000,00	(Rp2.200.000,00)
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp545.199.700,00	Rp1.433.068.700,00	Rp887.869.000,00
	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Rp31.699.700,00	Rp83.003.700,00	Rp51.304.000,00

Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp513.500.000,00	Rp1.350.065.000,00	Rp836.565.000,00
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Rp105.000.000,00	Rp126.641.000,00	Rp21.641.000,00
Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Rp100.000.000,00	Rp121.641.000,00	Rp21.641.000,00
Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Rp22.500.000,00	Rp22.500.000,00	Rp0,00
Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp22.500.000,00	Rp22.500.000,00	Rp0,00
Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp22.500.000,00	Rp22.500.000,00	Rp0,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Rp1.106.135.000,00	Rp941.729.000,00	(Rp164.406.000,00)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Rp1.106.135.000,00	Rp941.729.000,00	(Rp164.406.000,00)

		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Rp1.106.135.000,00	Rp941.729.000,00	(Rp164.406.000,00)
		Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Rp571.135.000,00	Rp475.735.000,00	(Rp95.400.000,00)
		Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Rp571.135.000,00	Rp475.735.000,00	(Rp95.400.000,00)
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Rp535.000.000,00	Rp465.994.000,00	(Rp69.006.000,00)
		Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Rp535.000.000,00	Rp465.994.000,00	(Rp69.006.000,00)
Total Anggaran yang berkontribusi terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2024			20,597,203,924.00	20,622,803,924.00	25,600,000.00

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran BPBD DIY Tahun 2024

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY sebagai berikut:

**Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja Tujuan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah DIY Tahun 2024**

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Terwujudnya Ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana	Kontribusi capaian 5 prioritas dalam IKD terhadap Ketahanan Daerah di DIY	Angka	101,4	Triwulan I	101,4
					Triwulan II	101,4
					Triwulan III	101,4
					Triwulan IV	101,4*)

Keterangan:

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome

**Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja Sasaran Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah DIY Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya Kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana	Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY	Angka	0,71	Triwulan I	0,71
					Triwulan II	0,71
					Triwulan III	0,71
					Triwulan IV	0,71*)
2.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di BPBD DIY	Kategori RB Perangkat Daerah	Indeks	A (87,16)	Triwulan I	A (87,16)
					Triwulan II	A (87,16)
					Triwulan III	A (87,16)
					Triwulan IV	A (87,16)

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No.	Program Perangkat Daerah	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 13.266.154.928,00
2.	Program Penanggulangan Bencana (APBD)	Rp 3.764.757.100,00
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (APBD)	Rp 22.500.000,00
4.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (DAIS)	Rp 941.729.000,00
	Jumlah Anggaran	Rp 17.995.141.028,00

- *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV

Pada tahun 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Reviu dilakukan karena adanya perubahan anggaran kegiatan dan telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja Perubahan Tujuan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY Tahun 2024

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana	Kontribusi capaian 5 prioritas dalam IKD terhadap Ketahanan Daerah DIY	Angka	101,4	Triwulan I	101,4
					Triwulan II	101,4
					Triwulan III	101,4
					Triwulan IV	101,4*)

Keterangan:

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome

Tabel II. 5 Perjanjian Kinerja Perubahan Sasaran Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana	Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY	angka	0,71	Triwulan I	0,71
					Triwulan II	0,71
					Triwulan III	0,71
					Triwulan IV	0,71*)
2.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di BPBD DIY	Kategori RB Perangkat Daerah	indeks	A (87,16)	Triwulan I	A (87,16)
					Triwulan II	A (87,16)
					Triwulan III	A (87,16)
					Triwulan IV	A (87,16)

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

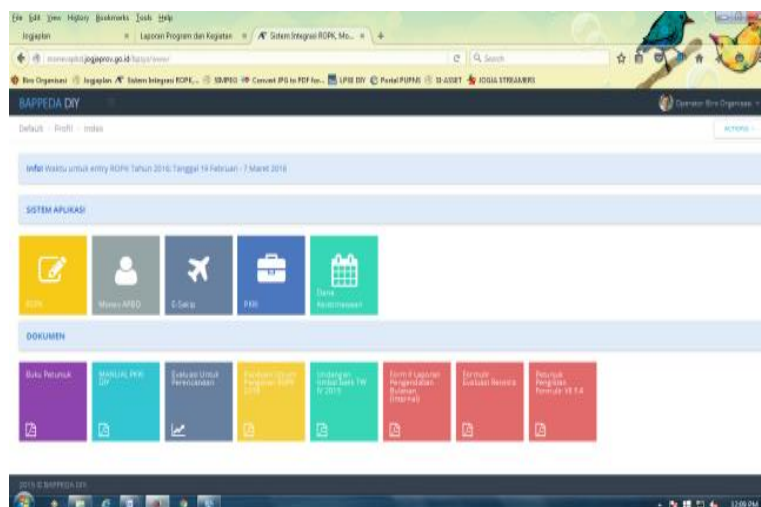
No.	Program Perangkat Daerah	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 13.266.154.928,00
2.	Program Penanggulangan Bencana	Rp 3.764.757.100,00
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp 22.500.000,00
4.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp 941.729.000,00
	Jumlah Anggaran	Rp 17.995.141.028,00

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV

2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi sungguh.jogjaprov.go.id yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD.

Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP



Sumber: <http://sungguh.jogjaprov.go.id/>

BAB III Akuntabilitas Kinerja

- Bab III berisi :**
- 1. Capaian Kinerja Tahun 2024
 - 2. Capaian Kinerja Lainnya
 - 3. Efisiensi Anggaran
 - 4. Inovasi
 - 5. Lintas Sektor

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024

Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY dengan Bapak Gubernur DIY tahun 2024. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel III. 2 Capaian Kinerja Tahun 2024

N O	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATU AN	BAS E LINE 2022	REAL ISASI 2023	TAHUN 2024				TARGE T AKHIR RPJMD/ RENST RA
						TAR GET	REALI SASI	PERS EN TASE	KRITE RIA/ KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana	<u>Indikator:</u> Kontribusi capaian 5 prioritas dalam IKD terhadap Ketahanan Daerah DIY <u>Meta Indikator:</u> Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY dibagi angka Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY dikali 100%	angka	93,7	100	101,4	101,4	100 %	San gat Baik	101,2

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2022	REALISASI 2023	TAHUN 2024				TARGET AKHIR RPJMD/ RENSTRA
						TARGET	REALISASI	PERSentase	KRITERIA/ KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana	<u>Indikator:</u> Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY <u>Meta Indikator:</u> (Skor Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik + Skor Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana + Skor Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana + Skor Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana + Skor Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana) dibagi 5	angka	0,59	0,65	0,71	0,71	100 %	Sangat Baik	0,86
2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di BPBD DIY	<u>Indikator:</u> Kategori RB Perangkat Daerah <u>Meta Indikator:</u> Hasil Penilaian Kategori Reformasi Birokrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun-n	indeks		BB (85,85)	A (87,16)	A (87,16)	100 %	Sangat Baik	A (87,46)

Adapun analisis capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

1.1.1. Tujuan Perangkat Daerah

Kinerja Tujuan Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana diukur dengan indikator dan meta indikator sebagai berikut:

Tabel III. 3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Tujuan	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana	Kontribusi capaian 5 prioritas dalam IKD terhadap Ketahanan Daerah DIY	Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY dibagi angka Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY dikali 100%

Sumber Data diolah dari sengguh.jogjaprovo.go.id

Kinerja Tujuan Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III. 7 Target dan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2024

No	Indikator Tujuan	Realisasi 2023	2024			Target Akhir Renstra (2027)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2027(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kontribusi capaian 5 prioritas dalam IKD terhadap Ketahanan Daerah DIY <u>Meta Indikator</u> Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY dibagi angka Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY dikali 100%	100	101,4	101,4 1. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik : 0,86 2. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana : 0,80 3. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana : 0,62 4. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana : 0,61 5. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana : 0,66 IKD DIY 2024 : 0,72 Perhitungan : $((0,86 + 0,80 + 0,62 + 0,61 + 0,66) / 5) / 0,72 \times 100 \%$ $((3,55 / 5) / 0,72) \times 100 \%$ $(0,72 / 0,71) \times 100 \%$ $1.014 \times 100 \%$ 101.4 %	100 %	101,2	101,4%

Keterangan kolom (5) adalah: Angka realisasi 2024 dilengkapi dengan cara menghitung (sesuai dengan meta indikator) untuk mendapatkan hasil capaian kinerja

Keterangan kolom (6) adalah: Angka %realisasi 2024 dilengkapi dengan cara menghitung untuk mendapatkan hasil capaian kinerja

Analisis Ketercapaian Tujuan : Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 100%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 101,4% (sesuai target).
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 100%, terdapat kenaikan sebesar 1,4%.
- c. Capaian target indikator pada tahun 2024 terhadap target tahun 2027 101,2%.

Capaian indikator tujuan tersebut didukung oleh kinerja 2 (dua) Sasaran Strategis, yakni Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana dan Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di BPBD DIY.

1.1.2. Sasaran 1: Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana

Kinerja sasaran **Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana** diukur dengan indikator dan meta indikator sebagai berikut:

Tabel III. 3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana	Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY	(Skor Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik + Skor Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana + Skor Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana + Skor Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana + Skor Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana) dibagi 5

Sumber data diolah dari Hasil Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada 37 (tiga puluh tujuh) OPD. Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2024, menggunakan indikator yang dirumuskan oleh Perangkat Daerah *leading sector* Reformasi Birokrasi General dan Perangkat Daerah Koordinator Reformasi Birokrasi Tematik yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 436/KEP/2024 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Daerah DIY Tahun 2024. Pelaksanaan Evaluasi RB Indikator tersebut merupakan indikator yang diturunkan dari Keputusan Menteri PAN dan RB RI Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024.

Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2024 menggunakan skema dan bobot nilai sebagai berikut:

Tabel III. 4 Skema dan bobot nilai Evaluasi Reformasi Perangkat Daerah

No	Uraian	Bobot	Keterangan
Reformasi Birokrasi General			
A	Strategi Pelaksanaan RB General	10	1 indikator
B	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	40	
	Sasaran 1 : Tata Kelola pemerintahan Digital yang Efektif Lincah dan Kolaboratif	32	12 indikator
	Sasaran 2 : Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional	8	2 indikator
C	Capaian sasaran Strategis RB	50	
	Sasaran 1 : Tata Kelola pemerintahan Digital yang Efektif Lincah dan Kolaboratif	28	4 indikator
	Sasaran 2 : Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional	22	3 indikator
Total RB General		100	
Reformasi Birokrasi Tematik			
A	Capaian Evaluasi RB Tematik Pengentasan Kemiskinan	5	5 indikator
B	Capaian Evaluasi RB Tematik Pengendalian Inflasi	5	4 indikator
C	Capaian Evaluasi RB Tematik Peningkatan Investasi	5	2 indikator
D	Capaian Evaluasi RB Tematik Penggunaan Produk Dalam Negeri	5	3 indikator
E	Capaian Evaluasi RB Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (<i>Stunting</i>)	5	5 indikator
Total RB Tematik		20	
Total Nilai RB		120	

Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel III. 5 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah tahun 2024

No	Unit Kerja	Nilai RB General 2024	Nilai RB Tematik 2024	INDEKS RB 2024	Kategori	Predikat	Nilai RB General 2023	Nilai RB Tematik 2023	INDEKS RB 2023	GAP
1	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	86,95	8,92	95,87	A	Memuaskan	83,77	5,81	89,58	6,29
2	Biro Hukum Setda DIY	84,28	5,85	90,13	A	Memuaskan	83,93	5,30	89,23	0,91

No	Unit Kerja	Nilai RB General 2024	Nilai RB Tematik 2024	INDEKS RB 2024	Kategori	Predikat	Nilai RB General 2023	Nilai RB Tematik 2023	INDEKS RB 2023	GAP
3	Biro Organisasi Setda DIY	87,57	9,06	96,63	A	Memuaskan	86,97	5,41	92,38	4,25
4	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY	83,26	5,18	88,44	A	Memuaskan	83,04	4,63	87,67	0,77
5	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY	83,51	10,23	93,74	A	Memuaskan	83,46	8,00	91,46	2,29
6	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY	86,60	6,88	93,48	A	Memuaskan	85,25	6,49	91,74	1,74
7	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	83,78	8,29	92,07	A	Memuaskan	83,67	4,50	88,17	3,90
8	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY	83,31	5,00	88,31	A	Memuaskan	83,39	5,25	88,64	-0,33
9	Paniradya Kaistimewan	84,31	9,68	93,99	A	Memuaskan	86,75	6,43	93,18	0,81
10	Sekretariat DPRD DIY	83,65	5,11	88,76	A	Memuaskan	77,60	4,33	81,93	6,83
11	Inspektorat DIY	89,25	6,99	96,24	A	Memuaskan	86,83	6,30	93,13	3,11
12	Dinas Pariwisata DIY	84,64	8,51	93,15	A	Memuaskan	82,67	5,73	88,40	4,75
13	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY	86,95	12,05	99,00	A	Memuaskan	85,72	6,87	92,59	6,41
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	84,07	11,40	95,47	A	Memuaskan	83,43	8,07	91,50	3,97
15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	85,45	12,00	97,45	A	Memuaskan	82,60	6,97	89,57	7,88
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY	84,94	7,61	92,55	A	Memuaskan	83,22	5,75	88,97	3,58
17	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	85,22	11,94	97,16	A	Memuaskan	83,95	6,81	90,76	6,40
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	85,47	8,46	93,93	A	Memuaskan	84,74	6,71	91,45	2,48
19	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY	83,49	12,39	95,88	A	Memuaskan	81,34	6,91	88,25	7,63
20	Dinas Perhubungan DIY	82,98	7,19	90,17	A	Memuaskan	83,79	5,25	89,04	1,13
21	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandhala Sarta Tata Sasana) DIY	83,26	7,38	90,64	A	Memuaskan	85,39	4,80	90,19	0,45
22	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	86,94	12,54	99,48	A	Memuaskan	86,71	8,25	94,96	4,52
23	Dinas Penanaman Modal dan	85,06	7,55	92,61	A	Memuaskan	86,42	6,17	92,59	0,03

No	Unit Kerja	Nilai RB General 2024	Nilai RB Tematik 2024	INDEKS RB 2024	Kategori	Predikat	Nilai RB General 2023	Nilai RB Tematik 2023	INDEKS RB 2023	GAP
	Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY									
24	Dinas Kesehatan DIY	87,83	9,64	97,47	A	Memuaskan	86,10	6,62	92,72	4,75
25	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY	82,52	9,94	92,46	A	Memuaskan	76,32	6,10	82,42	10,04
26	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY	89,36	6,94	96,30	A	Memuaskan	84,42	2,36	86,78	9,51
27	Dinas Sosial DIY	86,52	8,74	95,26	A	Memuaskan	86,13	7,00	93,13	2,13
28	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY	82,61	6,29	88,90	A	Memuaskan	82,35	4,24	86,59	2,32
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY	85,13	9,11	94,24	A	Memuaskan	84,43	5,52	89,95	4,29
30	Satuan Polisi Pamong Praja DIY	80,52	4,55	85,07	A	Memuaskan	81,91	4,00	85,91	-0,84
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY	88,83	10,25	99,08	A	Memuaskan	88,11	7,32	95,43	3,66
32	Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY	87,67	7,22	94,89	A	Memuaskan	88,56	5,85	94,41	0,48
33	Badan Kepegawaian Daerah DIY	89,65	7,04	96,69	A	Memuaskan	90,47	4,10	94,57	2,12
34	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	88,09	8,04	96,13	A	Memuaskan	87,61	4,44	92,05	4,08
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY	85,71	5,65	91,36	A	Memuaskan	83,74	4,97	88,71	2,66
36	Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY	80,83	6,33	87,16	A	Memuaskan	82,20	3,65	85,85	1,31
37	Badan Penghubung Daerah DIY	84,30	4,13	88,43	A	Memuaskan	79,88	2,53	82,41	6,03
RATA-RATA		85,26	8,22	93,48			84,24	5,66	89,90	3,58

Tabel III. 6 Kategori Hasil Evaluasi RB Tahun 2024 berdasar PERMENPAN RB Nomor 9 Tahun 2024 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi

No	Kriteri a	Nilai/ Angka	Predikat	Interpretasi
1	AA	> 100	Sangat Memuaskan	Memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing serta mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK

No	Kriteria	Nilai/ Angka	Predikat	Interpretasi
2	A	>80 - 100	Memuaskan	Memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
	A-		Memuaskan dengan Catatan	Memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
3	BB	>70 - 80	Sangat Baik	Memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
4	B	>60 - 70	Baik	Memenuhi sebagian kecil (<60%) kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian besar pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
5	CC	>50 - 60	Cukup	Penerapan RB dilaksanakan melalui sebagian kecil percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing
6	C	>30 - 50	Kurang	RB dilaksanakan sebatas formalitas, belum optimal menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK, sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing
7	D	0 -30	Sangat Kurang	RB dilaksanakan sebatas inisiatif awal, belum diformalkan dan belum menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK

Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Terdapat peningkatan nilai rata-rata indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2023 85,85 menjadi 87,16 pada Tahun 2024.
2. Jumlah Perangkat Daerah melaksanakan Reformasi Birokrasi kategori "sangat baik" (A) yaitu Tahun 2024 sejumlah 37 Perangkat Daerah.

No	Kategori	Predikat	2024	2023	2022	2021
1	AA	Sangat Memuaskan				
2	A	Memuaskan	37	37	35	22

No	Kategori	Predikat	2024	2023	2022	2021
	A-	Memuaskan dengan catatan				
3	BB	Sangat baik			2	15
4	B	Baik				
5	CC	Cukup				
6	C	Kurang				
7	D	Sangat Kurang				

Kinerja sasaran Meningkatnya Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana:

Tabel III. 7 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2023	2024			Target Akhir Renstra (2027)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2027(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY <u>Meta Indikator</u> ((Skor Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik + Skor Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana + Skor Peningkatan Efektivitas Pencegahan	0,65	0,65	0,71 Skor Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik + Skor Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana + Skor Peningkatan Efektivitas Penceg	109,23% (0,71/0,65* 100%)	0,86	109,23%

	dan Mitigasi Bencana + Skor Perkuatan Kesiapsiaga an dan Penanganan Darurat Bencana + Skor Pengemban gan Sistem Pemulihan Bencana) dibagi 5			ahan dan Mitigasi Bencan a + Skor Perkuat an Kesiaps iagaan dan Penang anan Darurat Bencan a + Skor Penge mbanga n Sistem Pemulih an Bencan a) dibagi 5			
--	---	--	--	--	--	--	--

Keterangan kolom (5) adalah: Angka realisasi 2023 dilengkapi dengan cara menghitung (sesuai dengan meta indikator) untuk mendapatkan hasil capaian kinerja

Keterangan kolom (6) adalah: Angka %realisasi 2023 dilengkapi dengan cara menghitung untuk mendapatkan hasil capaian kinerja

Analisis Ketercapaian Sasaran 1: Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di BPBD DIY adalah sebagai berikut:

- d. Tercapai 0,71%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 0,65% (terlampaui).
- e. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 0,65%, terdapat kenaikan sebesar 0,06%.
- f. Capaian target indikator pada tahun 2024 terhadap target tahun 2027 0,86%.

Keberhasilan capaian Sasaran 1, dengan Indikator Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY yang telah melaksanakan Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel III. 8 Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan SubKegiatan terhadap Sasaran
1

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
1. Program Penanggulangan Bencana		Skor Sistem Informasi, Diklat dan Logistik dalam IKD DIY	0,70	0,70	100%
		Skor Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana dalam IKD DIY	0,65	0,65	100%
		Skor Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana dalam IKD DIY	0,70	0,70	100%
		Skor Sistem Pemulihan Bencana dalam IKD DIY	0,70	0,70	100%
	1.1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi				
	1.1.1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang tersedia untuk melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	810 Orang	810 Orang	100%
	1.1.2. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	1. Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang dilegalisasi	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	1.2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				
	1.2.1 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Jumlah Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	45 Kawasan	45 Kawasan	100%
	1.2.2 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	1.2.3 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya dalam melaksanakan penanganan awal darurat bencana	32 Orang	32 Orang	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	1.2.4 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	1. Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	5 unit	5 unit	100%
		2. Penyediaan Alat Angkut, Transportasi, Mobilisasi	3 jenis	3 jenis	100%
		3. Penyediaan Alat Perlindungan, Shelter, Tenda	1 jenis	1 jenis	100%
		4. Penyediaan Alat Komunikasi dan Elektronik	1 jenis	1 jenis	100%
	1.3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				
	1.3.1 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	13 Laporan	13 Laporan	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	1.3.2 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana (DPA SIPD)	2500 Orang	2500 Orang	100%
	1.4 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				
	1.4.1 Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	1.4.2 Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2. Program Pencegahan, Penanggulangan ,Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran					
	2.1 Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		96,3%	96,09%	99,78%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	2.1.1 Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 Laporan	1 Laporan	100%
3. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan					
	3.1 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya		0,78	0,8	102,56%
	3.1.1 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi (Objek warisan budaya dan dunia yang harus dilindungi meliputi Kompleks Kepatihan, Pasar Bringharjo dan sekitarnya, Kompleks Kraton Ngayogyakarta, Masjid Kauman Dan Taman Sari)	1 Obyek	1 Obyek	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	3.2 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				
	3.2.1 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	1. Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		2. Peningkatan Kapasitas Abdi Dalem Kraton	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		3. Sosialisasi Pencegahan Bencana Pada Area Pemukiman Padat, Destinasi Wisata dan Cagar Budaya	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		4. Percepatan Dukungan Pembinaan dan Pengawasan Dalam Penerapan SPM Sub Urusan Bencana Di DIY	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Capaian tersebut didukung dari:

- a. Capaian Program 3 terdiri dari 1. Program Penanggulangan Bencana, 2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran, 3. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan.

Penjelasan disertai dokumentasi

- b. Capaian Program Penanggulangan Bencana

1) Gambar III.1 Laporan kaji cepat bencana



2) Gambar III.2 Petugas Olah Data

maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia

19 Larangan Pemberian Komisi

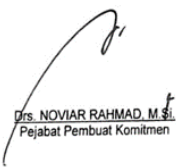
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20 Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. Selasa, 9 Januari 2024 sampai dengan Selasa 31 Desember 2024.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama DI Yogyakarta Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian	Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan (KSO) PT TRIMEDIA MULTIJAYA
 Drs. NOVIAR RAHMAD, M.Si Pejabat Pembuat Komitmen	 TRI SANI AMBAR SULISTYAWATI, S.E. JL. NGEKSIGONDO 8 RT/RW 011/003 PRENGGAN KOTAGEDE

c. Capaian Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

1) **Gambar III.3 Rapat Evaluasi kejadian kebakaran dan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan**



d. Capaian Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan.

1) **Gambar III.4 SK Tim Swakelola Sub Kegiatan Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia TA 2024**

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
 Nomor : 00.3.2/276
 Tentang : Penunjukan Tim Swakelola Sub Kegiatan Nominasi Warisan Budaya Nasional Dan Dunia

**SUSUNAN TIM SWAKELOLA
 SUB KEGIATAN NOMINASI WARISAN BUDAYA NASIONAL DAN DUNIA**

A. TIM PERSIAPAN

NO	NAMA	KETUGASAN	JABATAN
1	Drs. Noviar Rahmad, M.Si.	Ketua Tim	Kepala Pelaksana
2	Lilik Andi Aryanito, SIP, MM	Sekretaris	Kabid Penanganan Darurat, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
3	Robertus Ali Sadikin, S.H	Anggota	Kabid Logistik dan Peralatan
4	Yemmy Rianawati, S.T., M.T	Anggota	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi

B. TIM PELAKSANA

NO	NAMA	KETUGASAN	JABATAN
1	Danang Samsurizal, S.T.	Ketua	Kabid Kesiapsiagaan dan Pencegahan
2	Yuliana Sabilla Widya Ihsang S.T.	Sekretaris	Staf Pencegahan dan Kesiapsiagaan
3	Yan Richo Nielson Purba S.T., M.M	Anggota	Penata Penanggulangan Bencana
4	Enaryaka S. Kep.Ns. M.M	Anggota	Kepala Sub Bidang Pencegahan
5	Nur Dwi Jayanto S.Si	Anggota	Penata Penanggulangan Bencana
6	Fitri Mariana, S.H., M.Acc	Anggota	Penata Penanggulangan Bencana
7	Susana Prihita Riandani, S.E	Anggota	Analisis Kebencanaan
8	Agung Wicaksono, S.Sos, MPA	Anggota	Staf Pencegahan dan Kesiapsiagaan
9	Julianto Wibowo S.T.	Anggota	Staf Pencegahan dan Kesiapsiagaan
10	Maryanto S.T	Anggota	Staf Rehabilitasi Rekonstruksi
11	Meysita Noomassari, S.Si	Anggota	Staf Penanganan Darurat, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
12	Renny Apriliani, SKM	Anggota	Staf Penanganan Darurat, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
13	Mahyud S., S.Sos., M.Si	Anggota	Analisis Kebakaran
14	Andriani Tri Wulandari, S.Pd	Anggota	Staf Pencegahan dan Kesiapsiagaan
15	Saftri, S.Pd	Anggota	Staf Pencegahan dan Kesiapsiagaan
16	Intan Fadila, S.Pd	Anggota	Staf Pencegahan dan Kesiapsiagaan
17	Ladosanta Permana Amiko, S.Kom	Anggota	Staf Sekretariat

C. TIM PENGAWAS

NO	NAMA	KETUGASAN	JABATAN
1	Marlina Handayani S.Pd., MM	Ketua Tim	Sekretaris
2	Aulia Dian Fiquraini, S.T., M.Acc.	Sekretaris	Perencana
3	Ajun Eka Priyanti, SE, MM	Anggota	Kepala Subbag Umum
4	Miswanto, SIP, M.Si	Anggota	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
5	Fatin Mustola, S.IP	Anggota	Staf Sekretariat
6	Fitriani	Anggota	Staf Sekretariat

Ditetapkan di : Yogyakarta
 Pada tanggal : 22 Januari 2024

KEPALA PELAKSANA

Drs. NOVIAR RAHMAD, M.Si.
 NIP. 19701116 199003 1 001

Faktor Pendukung keberhasilan

- a. Ketersediaan dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat yang memberikan cukup keleluasaan kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menata kelembagaan Perangkat Daerah sebagai salah satu kewenangan dalam urusan keistimewaan.
- b. Komitmen dan pemahaman yang semakin baik dari para stakeholder terkait implementasi Budaya Pemerintahan Satriya.
- c. Dukungan anggaran baik melalui APBD maupun Dana Keistimewaan, koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan pemangku kepentingan, dan meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM aparatur pelaksana.

Faktor Penghambat keberhasilan

Rapat - rapat baik internal maupun eksternal yang sebagian besar dilakukan untuk menunjang monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan siaga darurat bencana Hidrometeorologi Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem dimana POSKO Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Banjir Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem yang telah didirikan, membutuhkan pantauan dan evaluasi berkala agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik sehingga kerjasama internal tim di BPBD DIY dan eksternal yaitu instansi-instansi terkait.

1.1.3. Sasaran 2 : Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di BPBD DIY

Kinerja sasaran Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di BPBD DIY diukur dengan Indikator dan meta indikator sebagai berikut:

Tabel III. 9 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

N O	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di BPBD DIY	Kategori RB Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Kategori Reformasi Birokrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun-n

Sumber data diolah dari Hasil Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada 37 (tiga puluh tujuh) OPD. Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2024, menggunakan indikator yang dirumuskan oleh Perangkat Daerah *leading sector* Reformasi Birokrasi General dan Perangkat Daerah Koordinator Reformasi Birokrasi Tematik yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 436/KEP/2024 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Daerah DIY Tahun 2024. Pelaksanaan Evaluasi RB Indikator tersebut merupakan indikator yang diturunkan dari Keputusan Menteri PAN dan RB RI Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024.

Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2024 menggunakan skema dan bobot nilai sebagai berikut:

Tabel III. 4 Skema dan bobot nilai Evaluasi Reformasi Perangkat Daerah

No	Uraian	Bobot	Keterangan
Reformasi Birokrasi General			
A	Strategi Pelaksanaan RB General	10	1 indikator
B	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	40	
	Sasaran 1 : Tata Kelola pemerintahan Digital yang Efektif Lincah dan Kolaboratif	32	12 indikator
	Sasaran 2 : Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional	8	2 indikator
C	Capaian sasaran Strategis RB	50	
	Sasaran 1 : Tata Kelola pemerintahan Digital yang Efektif Lincah dan Kolaboratif	28	4 indikator
	Sasaran 2 : Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional	22	3 indikator
Total RB General		100	
Reformasi Birokrasi Tematik			
A	Capaian Evaluasi RB Tematik Pengentasan Kemiskinan	5	5 indikator
B	Capaian Evaluasi RB Tematik Pengendalian Inflasi	5	4 indikator
C	Capaian Evaluasi RB Tematik Peningkatan Investasi	5	2 indikator
D	Capaian Evaluasi RB Tematik Penggunaan Produk Dalam Negeri	5	3 indikator
E	Capaian Evaluasi RB Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (<i>Stunting</i>)	5	5 indikator
Total RB Tematik		20	
Total Nilai RB		120	

Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel III. 5 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah tahun 2024

No	Unit Kerja	Nilai RB General 2024	Nilai RB Tematik 2024	INDEKS RB 2024	Kategori	Predikat	Nilai RB General 2023	Nilai RB Tematik 2023	INDEKS RB 2023	GAP
1	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	86,95	8,92	95,87	A	Memuaskan	83,77	5,81	89,58	6,29
2	Biro Hukum Setda DIY	84,28	5,85	90,13	A	Memuaskan	83,93	5,30	89,23	0,91

No	Unit Kerja	Nilai RB General 2024	Nilai RB Tematik 2024	INDEKS RB 2024	Kategori	Predikat	Nilai RB General 2023	Nilai RB Tematik 2023	INDEKS RB 2023	GAP
3	Biro Organisasi Setda DIY	87,57	9,06	96,63	A	Memuaskan	86,97	5,41	92,38	4,25
4	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY	83,26	5,18	88,44	A	Memuaskan	83,04	4,63	87,67	0,77
5	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY	83,51	10,23	93,74	A	Memuaskan	83,46	8,00	91,46	2,29
6	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY	86,60	6,88	93,48	A	Memuaskan	85,25	6,49	91,74	1,74
7	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	83,78	8,29	92,07	A	Memuaskan	83,67	4,50	88,17	3,90
8	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY	83,31	5,00	88,31	A	Memuaskan	83,39	5,25	88,64	-0,33
9	Paniradya Kaistimewan	84,31	9,68	93,99	A	Memuaskan	86,75	6,43	93,18	0,81
10	Sekretariat DPRD DIY	83,65	5,11	88,76	A	Memuaskan	77,60	4,33	81,93	6,83
11	Inspektorat DIY	89,25	6,99	96,24	A	Memuaskan	86,83	6,30	93,13	3,11
12	Dinas Pariwisata DIY	84,64	8,51	93,15	A	Memuaskan	82,67	5,73	88,40	4,75
13	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY	86,95	12,05	99,00	A	Memuaskan	85,72	6,87	92,59	6,41
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	84,07	11,40	95,47	A	Memuaskan	83,43	8,07	91,50	3,97
15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	85,45	12,00	97,45	A	Memuaskan	82,60	6,97	89,57	7,88
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY	84,94	7,61	92,55	A	Memuaskan	83,22	5,75	88,97	3,58
17	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	85,22	11,94	97,16	A	Memuaskan	83,95	6,81	90,76	6,40
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	85,47	8,46	93,93	A	Memuaskan	84,74	6,71	91,45	2,48
19	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY	83,49	12,39	95,88	A	Memuaskan	81,34	6,91	88,25	7,63
20	Dinas Perhubungan DIY	82,98	7,19	90,17	A	Memuaskan	83,79	5,25	89,04	1,13
21	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandhala Sarta Tata Sasana) DIY	83,26	7,38	90,64	A	Memuaskan	85,39	4,80	90,19	0,45
22	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	86,94	12,54	99,48	A	Memuaskan	86,71	8,25	94,96	4,52
23	Dinas Penanaman Modal dan	85,06	7,55	92,61	A	Memuaskan	86,42	6,17	92,59	0,03

No	Unit Kerja	Nilai RB General 2024	Nilai RB Tematik 2024	INDEKS RB 2024	Kategori	Predikat	Nilai RB General 2023	Nilai RB Tematik 2023	INDEKS RB 2023	GAP
	Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY									
24	Dinas Kesehatan DIY	87,83	9,64	97,47	A	Memuaskan	86,10	6,62	92,72	4,75
25	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY	82,52	9,94	92,46	A	Memuaskan	76,32	6,10	82,42	10,04
26	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY	89,36	6,94	96,30	A	Memuaskan	84,42	2,36	86,78	9,51
27	Dinas Sosial DIY	86,52	8,74	95,26	A	Memuaskan	86,13	7,00	93,13	2,13
28	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY	82,61	6,29	88,90	A	Memuaskan	82,35	4,24	86,59	2,32
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY	85,13	9,11	94,24	A	Memuaskan	84,43	5,52	89,95	4,29
30	Satuan Polisi Pamong Praja DIY	80,52	4,55	85,07	A	Memuaskan	81,91	4,00	85,91	-0,84
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY	88,83	10,25	99,08	A	Memuaskan	88,11	7,32	95,43	3,66
32	Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY	87,67	7,22	94,89	A	Memuaskan	88,56	5,85	94,41	0,48
33	Badan Kepegawaian Daerah DIY	89,65	7,04	96,69	A	Memuaskan	90,47	4,10	94,57	2,12
34	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	88,09	8,04	96,13	A	Memuaskan	87,61	4,44	92,05	4,08
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY	85,71	5,65	91,36	A	Memuaskan	83,74	4,97	88,71	2,66
36	Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY	80,83	6,33	87,16	A	Memuaskan	82,20	3,65	85,85	1,31
37	Badan Penghubung Daerah DIY	84,30	4,13	88,43	A	Memuaskan	79,88	2,53	82,41	6,03
RATA-RATA		85,26	8,22	93,48			84,24	5,66	89,90	3,58

Tabel III. 6 Kategori Hasil Evaluasi RB Tahun 2024 berdasar PERMENPAN RB Nomor 9 Tahun 2024 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi

No	Kriteria	Nilai/ Angka	Predikat	Interpretasi
1	AA	> 100	Sangat Memuaskan	Memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing serta mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK

No	Kriteria	Nilai/ Angka	Predikat	Interpretasi
2	A	>80 - 100	Memuaskan	Memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
	A-		Memuaskan dengan Catatan	Memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
3	BB	>70 - 80	Sangat Baik	Memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
4	B	>60 - 70	Baik	Memenuhi sebagian kecil (<60%) kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian besar pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
5	CC	>50 - 60	Cukup	Penerapan RB dilaksanakan melalui sebagian kecil percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing
6	C	>30 - 50	Kurang	RB dilaksanakan sebatas formalitas, belum optimal menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK, sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing
7	D	0 -30	Sangat Kurang	RB dilaksanakan sebatas inisiatif awal, belum diformalkan dan belum menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK

Kinerja sasaran Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di BPBD DIY pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III. 10 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2023	2024			Target Akhir Renstra (2027)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2027(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kategori RB Perangkat Daerah <u>Meta Indikator:</u> (Hasil Penilaian Kategori Reformasi Birokrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun-n)	A (Hasil Penilaian Kategori Reformasi Birokrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun-n)	A (85,85)	A (87,16) (Hasil Penilaian Kategori Reformasi Birokrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun-n)	101,52% (87,16/85,85 x100%)	A	101,52%

Keterangan kolom (5) adalah: Angka realisasi 2023 dilengkapi dengan cara menghitung (sesuai dengan meta indikator) untuk mendapatkan hasil capaian kinerja

Keterangan kolom (6) adalah: Angka %realisasi 2023 dilengkapi dengan cara menghitung untuk mendapatkan hasil capaian kinerja

Analisis Ketercapaian Sasaran 2 : Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah

- Berdasarkan hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2024, BPBD DIY mendapatkan nilai skor Indeks RB Perangkat daerah 87,16 dengan Kategori A (Memuaskan);
- Target tahun 2024 87,16% realisasi 87,16%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 87,16% (terlampai).
- Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 85,85%, terdapat kenaikan/penurunan sebesar 1,31%.
- Capaian target indikator pada tahun 2024 terhadap target tahun 2027 87,46%.

Keberhasilan capaian Sasaran 2, dengan Indikator Kategori RB Perangkat Daerah tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel III. 11 Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 2

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Capaian)
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Nilai PKKI Program Penunjan g Urusan Pemerinta h Daerah	86,92	86,92
	1. Perencana an, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	1.1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DPA SIPD)	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %
	2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
	2.1. Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (DPA SIPD)	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %
	3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	3.1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DPA SIPD)	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %
	4. Administra si Keuangan			

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Capaian)
	Perangkat Daerah			
	4.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang	110 Orang	100 %
	4.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %
	4.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100 %
	4.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	100 %
	5. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
	5.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100 %
	6. Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	6.1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100 %
	7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	7.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	100 %

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Capaian)
	7.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100 %
	8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	2 Unit	100 %
	8.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45 Unit	45 Unit	100 %
	8.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23 Unit	23 Unit	100 %
	8.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6 Unit	6 Unit	100 %
	Total Anggaran Pendukung	13.266.154.928		

Capaian tersebut didukung dari:

- a. Capaian Program 1 terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, 8 kegiatan dan 15 Sub Kegiatan.

Penjelasan disertai dokumentasi

b. Capaian Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1. Gambar III.5 Penyusunan Perjanjian Kinerja



2. Gambar III.6 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah



Faktor Pendukung keberhasilan

- a. Minat dan penawaran mitra atau stakeholder dalam mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana di BPBD DIY;
- b. Masyarakat banyak membutuhkan informasi terkait kegiatan dalam penanggulangan bencana.
- c. Merupakan kegiatan wajib mengikat yang harus dilakukan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD DIY
- d. SDM koordinatif dan kompeten
- e. Sarana dan prasarana pendukung

Faktor Penghambat keberhasilan (*Jika indikator kinerja tidak tercapai*)

- a. Belum semua staf memahami digitalisasi dengan penerapan banyak aplikasi baru dalam administrasi;
- b. Rasio jumlah SDM dan JF belum diketahui untuk memberikan pelayanan ke beberapa warga negara;
- c. Rasio kecukupan sarpras terhadap jumlah penerima layanan belum seimbang.

3.2. Capaian Kinerja Lainnya

- a. Capaian kinerja lainnya yang diampu oleh Perangkat Daerah, mengacu pada RPJPN, RIPB Tahun 2020-2044 juga mengacu pada Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim, Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 2015-2030, serta Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction/SFDRR) 2015-2030. Di samping itu RIPB Tahun 2020-2044 juga menjadi acuan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- b. **Capaian kinerja Program Prioritas Pemda sebagaimana Kepgub 353/KEP/2021**
- c. **Capaian kinerja Perangkat Daerah terhadap capaian sasaran Pemda DIY dan Program Pemda**

Sebagaimana amanat cascading Kinerja BPBD DIY memiliki kontribusi pada pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah dan Program pemerintah Daerah sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel III. 12 Kontribusi Tujuan dan Sasaran BPBD DIY terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Daerah

No	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Target	Realisasi
1.	Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban	Menurunkan risiko bencana	100	*) 100	Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana	Kontribusi capaian 5 prioritas dalam IKD terhadap Ketahanan Daerah DIY	101,4%	101,4%
					Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana	Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks	0,71	0,71

						Ketahan Daerah (IKD) DIY		
					Meningkat nya Tata Kelola Penyeleng garaan Urusan Pemerinta han di BPBD DIY	Kateg ori RB Peran gkat Daerah	A (87,16)	A (87,16)

Penjelasan (menjelaskan keterkaitan sasaran pada tahap capaian sasaran pmda):

1. Opini BPK WTP dan Nilai Akuntabilitas pemerintah (AKIP) dipengaruhi oleh kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada level pemerintah Daerah dan perangkat Daerah.
2. BPBD DIY sebagai Perangkat Daerah yang memiliki ketugasan penyiap bahan kebijakan Bidang Kelembagaan, Reformasi birokrasi, Ketatalaksanaan memiliki peran dalam membina Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY dalam berkontribusi dengan cara :
 - a. Melaksanakan pembinaan penataan Perangkat Daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis menuju Perangkat daerah yang agile dengan memperhatikan bentuk susunan Pemerintahan Asli
 - b. Melakukan pembinaan perbaikan Tatakelola Pemerintahan yang tergambarkan pada perolehan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah pada kategori A. Indeks RB kategori A pada Perangkat Daerah diperoleh melalui Evaluasi RB Perangkat Daerah Tahun 2024 yang telah mengakomodir indikator-indikator penilaian RB General (kualitas tata kelola internal) dan indikator RB Tematik (kualitas dampak pada tematik sebagaimana tertera pada KepmenPAN RB Nomor 182 tahun 2024.
3. Sebagai Perangkat Daerah mandiri, BPBD DIY juga diukur keberhasilan tatakelolanya melalui Sasaran Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan indikator Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY dan Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di BPBD DIY dengan indikator Kategori RB Perangkat Daerah.

Tabel III. 13 Kontribusi Program BPBD DIY terhadap Capaian Program Pemerintah Daerah

No	Program Pemerintah Daerah	Indikator Program Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	Program Perangkat Daerah	Indikator Program PD	Target	Realisasi	%Realisasi
1	Program Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan	Menurunkan risiko bencana	Tinggi	Tinggi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,92	86,92	100%

	Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban				TAHAN DAERAH PROVINSI				
					PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Skor Sistem Informasi, Diklat dan Logistik dalam IKD DIY	0,7	0,86	122,85%
						Skor Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana dalam IKD DIY	0,65	0,62	95,38%
						Skor Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana dalam IKD DIY	0,7	0,61	87,14%
						Skor Sistem Pemulihan Bencana dalam IKD DIY	0,7	0,66	94,28%
					PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Rerata Persentase Capaian SPM Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten/ Kota	96,3	96,09	99,78%
					PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Skor Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana dalam IKD DIY	0,78	0,8	102,56%

- Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, yaitu pada Program Prioritas Infrastruktur Pelayanan Dasar, Kegiatan Prioritas Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur, yang selanjutnya dijabarkan dalam 5 (lima) Proyek Prioritas, yaitu:
 - Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pengendali daya rusak air dan letusan gunung berapi
 - Penyusunan sistem peringatan dini dan peta risiko bencana wilayah/kawasan
 - Penyediaan infrastruktur perkuatan tebing, pengamanan pantai, penahan lumpur, pengendali banjir dan longsor
 - Pengembangan kebijakan penataan ruang, zonasi bencana, dan standardisasi kualitas bangunan berbasis ketangguhan bencana
 - Penyediaan sistem terpadu peringatan dini dan tanggap darurat bencana.

3.3. Analisis Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel III. 14 Capaian Kinerja, Realisasi Anggaran Belanja dan Efisiensi Anggaran Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (Rp)
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana	Kontribusi capaian 5 prioritas dalam IKD terhadap Ketahanan Daerah DIY	101,4%	101,4%	100%	17.995.141.028	17.995.141.028	100%	-
1.	Meningkatnya kapasitas	Rerata	0,71	0,71	100%	4.728.986.100	4.728.986.100	100%	-

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (Rp)
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	penyelenggaraan penanggulangan bencana	capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY							
2.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di BPBD DIY	Kategori RB Peringkat Daerah	A (87,16)	A (87,16)	100 %	13.266.154.928,00	13.266.154.928,00	100 %	-
Jumlah									-

Sumber: <http://sungguh.jogjaprovo.go.id/>, Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPBD DIY Th 2024, Laporan Keuangan BPBD DIY Th 2024

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja sasaran BPBD DIY melampaui target kinerja tahun 2024 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp17.995.141.028 terealisasi Rp17.995.141.028 atau 100% sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja telah efisien.

3.4. Inovasi

Untuk mendukung pencapaian kinerja BPBD DIY menggunakan aplikasi yang dipergunakan Pemda DIY untuk mendukung capaian kinerja serta pelayanan berupa aplikasi

1. E-SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi sungguh.jogjaprovo.go.id yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana

Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD.

2. sungguh.jogjaprovo.go.id yang mengintegrasikan perencanaan, SIPKD yang mengintegrasikan pengelolaan keuangan daerah, serta aplikasi

3. E-Lapor DIY untuk mengelola layanan aduan.

Selain itu BPBD DIY juga menggunakan instrumen pendukung penerapan pengelolaan data dan informasi penanggulangan bencana berupa aplikasi InaWARE dan DIBI yang terintegrasi secara nasional serta aplikasi PAMOR yang dikelola oleh Pusdalops PB BPBD DIY.

3.5. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY sebagaimana cascading kinerja pada gambar 1.1 dan mandat kinerja sebagaimana tergambar pada gambar 1.2 melaksanakan optimalisasi lintas sektor. Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor tersebut dilaksanakan berlandaskan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 9/INSTR/2021 tentang Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Optimalisasi kinerja Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor merupakan salah satu faktor pendukung Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan ditengah kondisi *Refocusing* dan realokasi anggaran. Inventarisasi Lintas Sektor Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY adalah sebagai berikut:

Tabel III. 15 Inventarisasi Lintas Sektor Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY

No	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Para Pihak		Output dan Kelompok Sasaran		Manfaat bagi OPD dan Manfaat bagi Kelompok Sasaran
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
1	Dukungan Pelaksanaan Launching 55 SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencana) di DIY	Badan Musyawarah Perbankan Daerah	Bantuan Peralatan berupa HT pada saat Launching SPAB		55 Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) yang diluncurkan	Alat Komunikasi yang dapat dipakai pada saat bencana
2	Informasi kondisi cuaca, gempa, dan iklim	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)	Update Informasi		Masyarakat	Bahan informasi yang disebarluaskan ke masyarakat
3	Informasi Perkembangan dan kondisi Gunung Merapi	BPPTKG	Update Informasi		Masyarakat	Bahan informasi yang disebarluaskan ke masyarakat

BAB IV Penutup

Bab IV berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Langkah Perbaikan Kinerja*

4.1. Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY tahun 2024 dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1. Uraikan hambatan permasalahan kinerja (dapat diidentifikasi dari factor man, money, material, method, machine; factor proses manajemen: *planning, organizing, actuating, controlling*; faktor *stakeholder* eksternal atau faktor proses bisnis yang ada selama ini berjalan.

2. Uraikan faktor kunci keberhasilan.

Beberapa faktor keberhasilan pekerjaan antara lain kegiatan yang dilakukan sesuai dengan mandat kinerja dengan kolaboratif dalam mencapai target kinerja serta Optimalisasi kinerja Silang Manajemen Lintas Sektor (Pentahelix)

Adapun langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut :

1. Melakukan upaya-upaya pencegahan bencana;
2. Melakukan pengurangan risiko bencana di sektor-sektor utama pembangunan daerah;
3. Melakukan mitigasi bencana struktural dan non struktural;
4. Memastikan kesiapan sistem penanggulangan bencana di daerah;
5. Melakukan kesiapsiagaan apabila terdapat potensi terjadinya bencana.
6. Mengembangkan sistem komando penanganan darurat bencana yang terstandarisasi;

7. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam penanganan kejadian bencana;
8. Meningkatkan akuntabilitas dalam penanganan darurat bencana;
9. Mengembangkan mekanisme pemulihan pascabencana yang lebih baik dari sebelum terjadi bencana dan berkelanjutan.

4.2. Langkah Perbaikan Kinerja

Adapun langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Meningkatkan nilai indeks ketahanan daerah yang meliputi :
2. Penilaian regulasi, kelembagaan dan perencanaan;
3. Penilaian sistem informasi dan peringatan bencana;
4. Penilaian upaya penelitian, pendidikan dan pelatihan terkait penanggulangan bencana;
5. Penilaian upaya pengurangan faktor-faktor risiko bencana;
6. Penilaian upaya kesiapsiagaan daerah untuk penanggulangan bencana

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

Tabel 4. 1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja Tujuan/ Sasaran (Baseline 2022)	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir Tahun (2027)
						Tahun ke-1 (2023)	Tahun ke-2 (2024)	Tahun ke-3 (2025)	Tahun ke-4 (2026)	Tahun ke-5 (2027)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana	Kontribusi capaian 5 prioritas dalam IKD terhadap Ketahanan Daerah DIY			93,7%	100%	101,4%	101,3%	101,3%	101,2%	101,2%
			Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana	Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY	0,59	0,65	0,71	0,76	0,81	0,86	0,86
			Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di BPBD DIY	Kategori RB Perangkat Daerah	BB > 70-80	A > 80-90	A > 80-90	A > 80-90	A > 80-90	A > 80-90	A > 80-90

Sumber: BPBD DIY (2024)

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2024



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Alamat: Jalan Kenari No. 14a, Yogyakarta, Telp (0274) 555836, Fax (0274) 554206
Website: bpbd.jogjapro.go.id, Email: bpbd@jogjapro.go.id, Kode Pos: 55166

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, terkait adanya penetapan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024, perlu dilakukan penyesuaian Perjanjian Kinerja. Sehubungan dengan hal tersebut, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. NOVIAR RAHMAD, M.Si
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HAMENGKU BUWONO X
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 23 Oktober 2024

PIHAK KEDUA
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



PIHAK PERTAMA
KEPALA PELAKSANA BPBD DIY,



Drs. NOVIAR RAHMAD, M.Si
NIP. 19701116 199003 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TUJUAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY
 Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya Ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana	Kontribusi capaian 5 prioritas dalam IKD terhadap Ketahanan Daerah di DIY	Angka	101,4	Triwulan I	101,4
					Triwulan II	101,4
					Triwulan III	101,4
					Triwulan IV	101,4*)

Keterangan:

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

Perjanjian Kinerja Perubahan Sasaran

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN SASARAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana	Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY	Angka	0,71	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0,71 0,71 0,71 0,71*)
2.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di BPBD DIY	Kategori RB Perangkat Daerah	Indeks	A (85,86)	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	A (85,86) A (85,86) A (85,86) A (85,86)*)

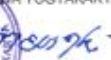
Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program Perangkat Daerah	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 13.266.154.628,00
2.	Program Penanggulangan Bencana (APBD)	Rp 2.870.988.100,00
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (APBD)	Rp 22.500.000,00
4.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (DAIS)	Rp 941.729.000,00
	Jumlah Anggaran	Rp 17.101.372.028,00

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

Yogyakarta, 29 Oktober 2024

PIHAK KEDUA
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

R. HENDI RAHMATUDDIN BUWONO X

PIHAK PERTAMA
KEPALA PELAKSANA BPBD DIY,

Drs. NOVIAN RAHMAD, M.Si
NIP. 19701116 199003 1 001

Lampiran 3. Evaluasi AKIP Tahun 2024



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INSPEKTORAT

Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta

Jalan Cendana Nomor 40 Yogyakarta Telp. (0274) 562009 Fax: (0274) 512567
Website: <http://inspektorat.jogjaprov.go.id> e-mail: inspektorat@jogjaprov.go.id Kode Pos 55186

Yogyakarta, 26-3-2024

Nomor : 700 / 534
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) pada Badan
Penanggulangan Bencana
Daerah DIY Tahun 2023

Kepada
Yth. Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana
Daerah DIY
di -
Yogyakarta

Dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY Tahun 2023, sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat;
- Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 432/KEP/2023 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2024;

f. Surat

- f. Surat Perintah Tugas Inspektur DIY Nomor 057/II/NSP/2024 Tanggal 22 Februari 2024 tentang Evaluasi AKIP Perangkat Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY.

2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, termasuk pada Perangkat Daerah merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah DIY.

3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP Perangkat Daerah;
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi yaitu pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

5. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

6. Gambaran /

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja Badan;
- b. perumusan, penetapan pedoman dan pengarahan penyelenggaraan kebijakan teknis urusan penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah;
- c. penetapan standarisasi kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah;
- d. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah;
- e. penyusunan, penetapan dan penginformasian peta risiko bencana dan kebakaran serta prosedur tetap penanganan bencana dan kebakaran;
- f. pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam pembangunan;
- g. pelaksanaan komando penanganan darurat bencana;
- h. pengendalian, pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana di daerah;
- i. penyusunan rekomendasi tingkatan dan status bencana;
- j. pengembangan kerjasama dengan multipihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran;
- k. pembinaan reformasi birokrasi Badan;
- l. penyusunan kebijakan proses bisnis Badan;
- m. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- n. pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang penanggulangan bencana dan kebakaran;
- o. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana dan kebakaran kabupaten/kota;
- p. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- q. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
- r. pelaksanaan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan ... /

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY terdiri atas:

- a. Kepala Pelaksana Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas Subbagian Umum;
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas Subbidang Pencegahan;
- d. Bidang Penanganan Darurat, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- e. Bidang Logistik dan Peralatan;
- f. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

7. Gambaran Umum Implementasi AKIP Perangkat Daerah

Implementasi AKIP pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Pada aspek perencanaan kinerja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY telah memiliki dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.
- b. Pada aspek pengukuran kinerja, telah terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja, serta dilakukan secara berkala.
- c. Pada aspek pelaporan kinerja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), memformalkan, serta mempublikasikan dokumen pelaporan tersebut.
- d. Pada aspek evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang yang melibatkan seluruh unsur dalam organisasi. Dalam rangka peningkatan manajemen kinerja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY telah menggunakan Aplikasi Sengguh dalam rangka pengendalian dan evaluasi kinerja instansi. Dalam pengelolaan sumber daya manusia telah digunakan Aplikasi ASN Memayu sebagai sarana pengisian capaian kinerja pada tingkat individu. Inovasi lain dalam peningkatan kinerja yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY diantaranya InaWARE yaitu aplikasi pemantauan bencana yang mengintegrasikan dan berbagai data pantauan bencana seluruh dunia. Aplikasi ini dikembangkan untuk meningkatkan sistem peringatan dini, baik di tingkat pusat dan daerah. Selain itu digunakan pula aplikasi DIBI

dan 

dan PAMOR yang merupakan media untuk melakukan pengelolaan data informasi penanggulangan bencana oleh Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) yang telah tersertifikasi ISO 9001-2015. Penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut secara langsung dapat membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY dalam rangka melaksanakan tugas fungsinya guna mencapai tujuan organisasi.

8. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya

Terhadap rekomendasi atas evaluasi tahun sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY telah menindaklanjuti dengan:

- a. Meningkatkan koordinasi internal secara rutin agar setiap unsur dalam organisasi (Sekretariat/Bidang/Subbag/Subbid/Kelompok Substansi) memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
- b. Meningkatkan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja yang telah diperjanjikan.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY memperoleh nilai sebesar 84,14. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 25,64 atau 85,45% dari bobot sebesar 30%;
- b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 25,36 atau 84,55% dari bobot sebesar 30%;
- c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,64 atau 84,29% dari bobot sebesar 15%;
- d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 20,50 atau 82,00% dari bobot sebesar 25%.

2. Rekomendasi

Direkomendasikan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY agar:

- a. Memaksimalkan pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja agar dapat digunakan untuk meningkatkan

efisiensi

efisiensi dan efektivitas pelaksanaan aktivitas-aktivitas yang menunjang program/kegiatan.

- b. Meningkatkan pengendalian internal khususnya dalam penentuan indikator kinerja program dan rumusan indikator agar lebih menggambarkan rncian kinerja yang akan dicapai.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY memperoleh nilai 84,14. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi Memuaskan.

2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian output organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada outcome yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah DIY. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY Tahun 2023, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKTORAT
MURAHID BETIADI, S.Pt., M.Acc.
NIP 19671004 199203 1 0053

Tembusan:
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi AKIP Tahun 2024



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Alamat: Jalan Kenari No. 14a, Yogyakarta, Telp (0274) 555836, Fax (0274) 554220
Website: bpbd.jogjapro.go.id, Email: bpbd@jogjapro.go.id, Kode Pos: 55166

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023

Berdasarkan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Surat Nomor : 700 / 534 tanggal 26 Maret 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), bahwa tindak lanjut yang dilakukan atas rekomendasi LHE AKIP sebagai berikut :

No.	Saran / Rekomendasi LHE AKIP	Tindak Lanjut
1.	a) Memaksimalkan pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja agar dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan aktivitas-aktivitas yang menunjang program/kegiatan;	- Terhadap kinerja kegiatan telah menunjukan adanya perbaikan kualitas pada Log Frame, KAK, ROPK dengan keterisian 100%, lebih rinci dan terjadwal; - Catatan hasil movev terkait kinerja OPD telah di tindak lanjuti dengan kolaborasi berupa pelibatan lintas sektor dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran OPD maupun pencapaian target program; - Catatan terhadap pelaksanaan Dana Keistimewaan telah di tindak lanjuti dengan capaian fisik 100% dengan deviasi kurang 5% ; - Tindak lanjut atas hasil movev PBJ berupa RUP 100 %, SPSE 100%; - Catatan hasil movev atas keterisian aplikasi Jogja Dataku sudah diindak lanjuti dengan capaian Dataku 100%.

	b) Meningkatkan pengendalian internal khususnya dalam penentuan indikator kinerja program dan rumusan indikator agar lebih menggambarkan rincian kinerja yang akan dicapai.	- Melakukan penghematan terhadap pemakaian listrik, air dan telepon; - Perencanaan yang dilakukan berdasarkan skala prioritas; - Mengatur kegiatan sesuai dengan angka yang telah disusun; - Perbaikan dalam pola penataan keuangan instansi.
--	--	--



Kepala Pelaksana,

DR. NOVIAR RAHMAD, M.Si.

Lampiran 5. Lain lain

Dokumen pendukung atas isian pada tabel II.2 (Dokumen Perubahan RENSTRA Tahun 2022-2027)





PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA